

Peran Pemerintah Dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Desa Lamoncong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

Fitriani Syahrir¹, Usman², Syamsidar³

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

*Coreespondence email: fitirianis11@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengangkat pokok masalah tentang Peran Pemerintah dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Petani di Desa Lamoncong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone dengan tujuan mengetahui bagaimana deskripsi kesejahteraan masyarakat petani di Desa Lamoncong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Berdasarkan Perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani di Desa Lamoncong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara, dokumentasi, kemudian teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi kata, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagaimana deskripsi kesejahteraan masyarakat petani berdasarkan perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan dilakukan dengan indikator ekonomi kesejahteraan, indikator sosial kesejahteraan, indikator kesejahteraan dan pendidikan, serta tingkat partisipasi sosial dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan petani dilakukan dengan akses pendidikan agama dalam meningkatkan kesejahteraan, akses kesehatan dalam meningkatkan kesejahteraan, infrastruktur dalam meningkatkan kesejahteraan, serta sinergi akses pendidikan agama, kesehatan dan infrastruktur. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan peran aktif pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat petani di Desa Lamoncong memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup petani.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Kesejahteraan dan Masyarakat Petani

Abstract: This study raises the main problem of the Role of Government in Supporting the Welfare of Farming Communities in Lamoncong Village, Bontocani District, Bone Regency with the aim of knowing how the description of the welfare of farming communities in Lamoncong Village, Bontocani District, Bone Regency Based on the Perspective of Law Number 11 of 2009 concerning welfare and how government policies in improving the welfare of farmers in Lamoncong Village, Bontocani District, Bone Regency. This study uses a qualitative research type with data collection methods in the form of direct observation, interviews, documentation, then data processing techniques and data analysis are carried out by collecting data, word reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that how the description of the welfare of farming communities based on the perspective of Law Number 11 of 2009 concerning welfare is carried out with indicators of economic welfare, social welfare indicators, indicators of welfare and education, as well as the level of social participation and how government policies in improving the welfare of farmers are carried out with access to religious education in improving welfare, access to health in improving welfare, infrastructure in improving welfare, as well as synergy of access to religious education, health and infrastructure. The implications of this study show that the active role of the government in supporting the welfare of the farming community in Lamoncong Village has a significant impact on improving the standard of living of farmers.

Keywords: The Role Of Government, Welfare Of Farming Communities

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan masyarakat petani merupakan isu fundamental dalam pembangunan nasional, mengingat sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat perdesaan di Indonesia. Petani tidak hanya berperan sebagai produsen pangan, tetapi juga sebagai penopang ketahanan pangan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan ekonomi nasional. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan petani menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.

Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat petani masih berada dalam kondisi kesejahteraan yang rendah. Permasalahan klasik seperti keterbatasan akses terhadap modal, teknologi pertanian modern, pasar, serta rendahnya nilai tukar hasil pertanian masih menjadi tantangan utama. Kondisi ini diperparah oleh ketergantungan petani pada metode pertanian tradisional yang kurang produktif, sehingga pendapatan yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Selain faktor ekonomi, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan juga berkontribusi terhadap rendahnya kesejahteraan masyarakat petani. Rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada lemahnya kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial antara masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Potensi ekonomi desa sejatinya merupakan modal penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa memiliki karakteristik, sumber daya alam, dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi. Namun, optimalisasi potensi ekonomi desa sangat bergantung pada peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung, termasuk penyediaan infrastruktur, pendampingan, serta penguatan kelembagaan masyarakat desa.

Desa Lamoncong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, merupakan salah satu wilayah perdesaan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat petani. Kondisi geografis yang relatif terpencil, akses transportasi yang terbatas, serta infrastruktur dasar yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam pembangunan desa. Jarak yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kecamatan turut memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan publik dan program pemerintah.

Dalam konteks tersebut, peran pemerintah menjadi sangat strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat petani. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti petani. Kebijakan pemerintah yang tepat dan berkelanjutan diharapkan mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat petani serta menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang lebih adil.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menegaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu menjalankan fungsi sosialnya. Perspektif ini menempatkan kesejahteraan sebagai konsep multidimensional yang tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam peran pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat petani di Desa Lamoncong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesejahteraan petani berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani secara berkelanjutan. .

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi kesejahteraan masyarakat petani serta peran pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara langsung di Desa Lamoncong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, dengan menekankan pada pemahaman fenomena sosial berdasarkan kondisi alamiah (*natural setting*).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat petani yang dianggap memiliki informasi relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai peran pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akses Pendidikan Agama dalam Meningkatkan Kesejahteraan

1. Kondisi Pendidikan Agama di Desa Lamoncong

Pendidikan agama di Desa Lamoncong diselenggarakan melalui berbagai lembaga formal maupun non-formal. Terdapat 3 unit Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 15 unit Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang tersebar di seluruh dusun. Selain itu, terdapat pula kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan di masjid dan musholla setiap hari Jumat dan Minggu.

2. Dampak Pendidikan Agama terhadap Pembentukan Karakter

Nilai-nilai agama yang diperoleh melalui pendidikan agama telah menjadi landasan moral dalam kehidupan sehari-hari. Konsep berbagi dan saling membantu yang diajarkan dalam agama Islam telah menciptakan sistem jaminan sosial informal di masyarakat, dimana keluarga yang berkecukupan membantu keluarga yang kurang mampu melalui zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Kontribusi Pendidikan Agama terhadap Ekonomi Masyarakat

Lembaga-lembaga keuangan syariah yang dikembangkan atas dasar pendidikan agama, seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan kelompok simpan pinjam syariah,

telah membantu masyarakat dalam mengakses modal usaha. Terdapat 3 unit BMT dan kelompok simpan pinjam syariah yang melayani kebutuhan modal usaha masyarakat dengan sistem bagi hasil.

Pendidikan agama juga menumbuhkan semangat kemandirian dan kewirausahaan, khususnya di kalangan ibu rumah tangga dan pemuda desa. Kegiatan pengajian, madrasah, dan pelatihan berbasis masjid menjadi wadah penting dalam menggabungkan aspek spiritual dan ekonomi.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pendidikan Agama

Tantangan utama dalam pengembangan pendidikan agama di Desa Lamoncong adalah keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai. Mayoritas tenaga pengajar masih mengandalkan metode konvensional tanpa memanfaatkan teknologi pembelajaran modern.

Peran Akses Kesehatan dalam Meningkatkan Kesejahteraan

1. Kondisi Fasilitas Kesehatan

Akses terhadap layanan kesehatan di Desa Lamoncong masih sangat terbatas. Hanya terdapat 1 unit Pustu (Puskesmas Pembantu) yang melayani seluruh desa dengan 4 dusun, dan 2 unit Poskesdes (Pos Kesehatan Desa) yang dikelola oleh bidan desa. Fasilitas kesehatan terdekat yang lebih lengkap adalah Puskesmas Bontocani yang berjarak 12 km dari pusat desa.

2. Program Kesehatan Masyarakat dan Dampaknya

Beberapa program kesehatan masyarakat telah diimplementasikan di Desa Lamoncong dengan hasil yang bervariasi. Program Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang diselenggarakan setiap bulan di masing-masing dusun telah berhasil meningkatkan cakupan imunisasi dan pemantauan pertumbuhan balita. Namun, keberlanjutan program-program tersebut masih menghadapi tantangan karena keterbatasan dana operasional dan komitmen kader. Banyak kader yang berhenti aktif karena tidak ada insentif yang memadai.

3. Inovasi Pelayanan Kesehatan

Untuk mengatasi keterbatasan akses kesehatan, beberapa inovasi telah dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Program "Motor Sehat" yang menggunakan sepeda motor untuk pelayanan kesehatan keliling telah membantu menjangkau daerah-daerah terpencil. Pemanfaatan teknologi informasi melalui program telemedicine juga mulai dikembangkan. Meskipun masih terbatas karena kendala sinyal internet, program ini telah membantu beberapa kasus konsultasi jarak jauh dengan dokter di Puskesmas.

Peran Infrastruktur dalam Meningkatkan Kesejahteraan

1. Kondisi Infrastruktur Transportasi

Infrastruktur transportasi merupakan tantangan utama dalam pembangunan Desa Lamoncong. Jalan utama yang menghubungkan desa dengan kecamatan sepanjang

12 km masih berupa jalan berbatu dengan kondisi yang rusak parah, terutama pada musim hujan. Jalan antar dusun dalam desa juga masih berupa jalan tanah yang sulit dilalui kendaraan roda empat. Hanya 30% dari total panjang jalan desa yang sudah dihotmix atau dipaving, sisanya masih berupa jalan tanah atau berbatu.

Secara umum, infrastruktur komunikasi di Desa Lamoncong masih tergolong terbatas. Akses sinyal telepon seluler belum merata di seluruh wilayah desa, sehingga menyulitkan warga dalam berkomunikasi, terutama di daerah-daerah terpencil, perbukitan, dan yang jauh dari pusat desa.

2. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi

Akses terhadap air bersih masih menjadi masalah serius di Desa Lamoncong. Hanya 35% rumah tangga yang memiliki akses air bersih dari sumur bor atau mata air yang aman.¹⁷ Sisanya masih mengandalkan air hujan yang ditampung dalam bak penampungan atau mengambil air dari sumber air tradisional yang kualitasnya belum terjamin.

Pada musim kemarau, krisis air bersih sering terjadi karena sumber air tradisional mengering. Masyarakat harus menempuh jarak 2-3 km untuk mengambil air dari mata air yang masih mengalir.¹⁸ Kondisi ini sangat memberatkan, terutama bagi ibu-ibu yang harus mengangkut air untuk kebutuhan rumah tangga.

3. Dampak Infrastruktur terhadap Perekonomian

Keterbatasan infrastruktur berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Biaya transportasi yang tinggi menyebabkan harga jual hasil pertanian di tingkat petani menjadi rendah karena harus menanggung biaya transportasi yang mahal.¹⁹ Sebaliknya, harga barang kebutuhan pokok di desa menjadi lebih mahal karena biaya distribusi yang tinggi. Infrastruktur yang buruk juga menghambat masuknya investor atau pengembangan usaha skala besar yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Kondisi ini menyebabkan banyak pemuda desa yang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan.

4. Upaya Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah desa bersama pemerintah kabupaten telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki infrastruktur. Program Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa telah digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton sepanjang 2 km dan pembangunan jembatan penghubung antar dusun. Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) telah berhasil membangun 5 unit sumur bor dan jaringan perpipaan yang melayani 150 rumah tangga²². Meskipun belum mencakup seluruh desa, program ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat yang terlayani.

KESIMPULAN

Kesejahteraan petani bukan hanya dilihat dari peningkatan pendapatan semata, tetapi juga dari adanya akses terhadap layanan dasar, kepastian usaha tani, perlindungan hak-hak sosial, serta keterlibatan aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan. Negara berkewajiban menghadirkan kebijakan yang berpihak pada petani melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan

kapasitas, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai demi menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi masyarakat petani. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani merupakan upaya strategis dan berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan petani. Pemerintah berperan melalui program subsidi pertanian, penyediaan akses permodalan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih holistik untuk meningkatkan kesejahteraan petani, terutama dalam bidang perlindungan sosial, akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur pertanian. Memperkaya kajian akademik mengenai kesejahteraan sosial dalam konteks petani sebagai kelompok rentan. Dengan menggunakan perspektif UU No. 11 Tahun 2009, penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dengan akses terhadap pelayanan dasar, partisipasi sosial, dan jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Renaldi A. Rattu, Femmy. M. G. Tulusan, Rully Mambo, 'Pengaruh Potensi Ekonomi Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tempok Selatan Kecamatan Tomposo Kabupaten Minahasa', *Jurnal Administrasi Publik*, 123.8 (2022)
- M. Sayuti Ali. *Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek* (Cet. 1; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022)
- Kementerian Sosial RI. (2024). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2024*. Jakarta: Kemensos RI.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Survei Literasi Digital Indonesia 2023*. Jakarta: Kominfo.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2023). *Evaluasi Kelembagaan Desa di Indonesia 2023*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Kementerian Agama Kabupaten Bone. (2023). *Data Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Bone 2023*. Watampone: Kemenag Bone.
- Baznas Kabupaten Bone. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah 2023*. Watampone: Baznas Bone
- Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Selatan. (2023). *Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sulawesi Selatan*. Makassar: OJK Sulsel
- Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. (2022). *Modernisasi Pendidikan Agama di Daerah Terpencil Sulawesi Selatan*. Makassar: Balitbang Agama
- Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. (2023). *Pemetaan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Bone 2023*. Watampone: Dinkes Bone
- Direktorat Kesehatan Keluarga. (2023). *Evaluasi Program Posyandu Indonesia 2023*.

Jakarta: Ditkes Keluarga Kemenkes.

Rahmat, H., & Salam, A. (2023). Keberlanjutan Program Kesehatan Berbasis Masyarakat di Desa Terpencil. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(3), 234-248.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone. (2024). *Inovasi Pelayanan Kesehatan Desa Terpencil*. Watampone: Dinkes Bone

Direktorat Jenderal Bina Marga. (2023). *Kondisi Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten 2023*. Jakarta: Ditjen Bina Marga Kemen PUPR

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone. (2023). *Inventarisasi Jalan Desa di Kabupaten Bone*. Watampone: DPU Bone

Direktorat Jenderal Cipta Karya. (2023). *Status Akses Air Minum Aman Indonesia 2023*. Jakarta: Ditjen Cipta Karya Kemen PUPR

Pusat Penelitian Limnologi LIPI. (2022). *Krisis Air Bersih di Daerah Perdesaan Indonesia*. Jakarta: LIPI Press

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. (2023). *Analisis Rantai Pasok Komoditas Pertanian di Daerah Terpencil*. Bogor: PSE KP

Badan Pusat Statistik. (2023). *Mobilitas Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: BPS.

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal. (2023). *Evaluasi Penggunaan Dana Desa 2023*. Jakarta: Ditjen PDT Kemendes PDTT

Direktorat Pengembangan Air Minum. (2023). *Laporan Program PAMSIMAS Nasional 2023*. Jakarta: Dit. PAM Kemen PUPR